

MEMBANGUN INDONESIA BERINTEGRITAS: NILAI ANTI KORUPSI SEBAGAI SIMBOL KEBANGSAAN

Muhammad Yusufi Ar Rahman¹, Raihan Hisyam²

Correspondensi e-mail: yusufarrahman@gmail.com

^{1,2}Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Kab. Semarang

ABSTRACT

This study aims to analyze the construction and internalization strategies of anti-corruption values as a national symbol in strengthening Indonesia's national identity based on integrity. Corruption remains a structural and cultural challenge, indicating the need for approaches beyond law enforcement toward value transformation within education, public policy, and social culture. This research applies a socio-legal approach using qualitative methods through policy document analysis, institutional reports, and a review of recent scholarly literature from the last five years. The findings reveal that integrity can be positioned as a core element of national identity when anti-corruption values are institutionalized through bureaucratic reform and digital governance, internalized within holistic character education systems, and cultivated through ethical leadership and civic participation. Such multidimensional strategies reinforce the legitimacy of integrity as a national symbol and enhance public trust in state institutions. The study concludes that building an integrity-based Indonesia is a continuous process requiring synergy among the state, educational institutions, and civil society to transform anti-corruption values into a collective national identity.

ARTICLE INFO

Submitted: 11 February 2025

Revised: 19 February 2025

Accepted: 26 February 2025

Keywords:

Anti-Corruption Values; National Integrity; National Identity; Character Education; Public Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan strategi internalisasi nilai-nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan dalam membangun identitas nasional Indonesia yang berintegritas. Korupsi yang masih menjadi tantangan struktural dan kultural menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga transformasi nilai dalam pendidikan, kebijakan publik, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, serta kajian literatur lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas dapat diposisikan

DOI:

[10.55080/junagara.v2i1.1885](https://doi.org/10.55080/junagara.v2i1.1885)

sebagai identitas nasional apabila nilai anti korupsi diinstitusionalisasikan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola, diinternalisasikan dalam sistem pendidikan karakter yang holistik, serta dibudayakan melalui keteladanan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Strategi multidimensional tersebut memperkuat legitimasi simbol kebangsaan berbasis integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara. Penelitian ini menegaskan bahwa membangun Indonesia berintegritas merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil guna menjadikan nilai anti korupsi sebagai jati diri kolektif bangsa.

Kata kunci:

Nilai Anti Korupsi; Integritas Nasional; Identitas Kebangsaan; Pendidikan Karakter; Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023*, skor Indonesia berada pada angka 34 dari skala 0–100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International, 2023*). Angka tersebut menunjukkan stagnasi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dan menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Lebih dari sekadar persoalan hukum, korupsi berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. *World Bank (2022)* menegaskan bahwa korupsi berkontribusi terhadap inefisiensi anggaran publik dan memperlebar kesenjangan sosial, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar pada sektor politik dan birokrasi, tetapi juga dalam praktik keseharian yang terinternalisasi secara sosial, seperti gratifikasi kecil, penyalahgunaan jabatan, dan nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2022–2023 terdapat ratusan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, dengan modus dominan berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan (*KPK, 2023*). Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi persoalan sistemik yang tidak cukup ditangani melalui pendekatan represif semata. Dibutuhkan transformasi budaya dan internalisasi nilai anti korupsi sebagai bagian dari etika publik dan identitas kebangsaan.

Dalam konteks ideologi negara, nilai anti korupsi sejatinya selaras dengan prinsip Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Integritas, tanggung jawab, dan kejujuran merupakan nilai moral yang melekat dalam konstruksi identitas nasional Indonesia. Namun demikian, tantangan globalisasi dan dinamika politik domestik sering kali menyebabkan terjadinya disonansi antara nilai ideal kebangsaan dan praktik sosial di lapangan. Penelitian *OECD (2022)* menekankan bahwa pembangunan integritas publik harus berbasis pada penguatan nilai bersama (*shared values*) yang menjadi fondasi budaya organisasi dan budaya masyarakat secara luas. Tanpa penguatan nilai, reformasi hukum dan kelembagaan cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar persoalan.

Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu strategi utama dalam membangun budaya integritas. Program pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum nasional menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya kejujuran dan tanggung jawab (*KPK, 2022*). Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan ekosistem sosial yang konsisten. Pendidikan nilai yang tidak didukung oleh teladan kepemimpinan dan praktik birokrasi yang bersih berpotensi menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, nilai anti korupsi perlu dibangun sebagai gerakan kebangsaan yang melibatkan keluarga, sekolah, institusi publik, dan masyarakat sipil secara simultan.

Selain itu, era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam penguatan budaya integritas. Transformasi digital pemerintahan melalui e-government dan sistem transparansi

daring memungkinkan peningkatan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan (UNDP, 2024). Digitalisasi sistem pengadaan, pelaporan, dan layanan publik telah terbukti mengurangi peluang praktik koruptif di beberapa sektor. Namun di sisi lain, ruang digital juga membuka celah bagi manipulasi informasi, disinformasi politik, dan polarisasi opini yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi. Oleh karena itu, integritas sebagai simbol kebangsaan perlu diperkuat melalui literasi digital dan etika publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dari perspektif teori identitas nasional, suatu bangsa dibangun melalui konstruksi nilai kolektif yang disepakati dan dipraktikkan secara konsisten. Ketika nilai anti korupsi dijadikan simbol kebangsaan, maka integritas menjadi bagian dari jati diri kolektif masyarakat. Teori civic virtue menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada karakter moral warga negara, termasuk komitmen terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, membangun Indonesia berintegritas berarti menanamkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap identitas nasional.

Lebih jauh lagi, survei nasional menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi negara dalam menegakkan hukum juga melemah. Oleh karena itu, internalisasi nilai anti korupsi harus diiringi dengan konsistensi penegakan hukum dan transparansi kebijakan publik. Sinergi antara reformasi struktural dan penguatan nilai budaya menjadi prasyarat utama dalam membangun identitas nasional berbasis integritas.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan yang hidup dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya melihat korupsi sebagai persoalan kriminalitas, tetapi sebagai fenomena sosial dan kultural yang memerlukan pendekatan multidimensional. Melalui analisis terhadap data empiris dan literatur mutakhir, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai anti korupsi dapat dijadikan fondasi identitas nasional Indonesia serta merumuskan strategi implementasi yang efektif dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *socio-legal (normatif-empiris)* untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai anti korupsi dapat dikonstruksi sebagai simbol kebangsaan dalam membangun Indonesia berintegritas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa regulasi, kebijakan, dan dokumen resmi tentang pemberantasan korupsi, tetapi juga menelaah praktik sosial, persepsi masyarakat, serta dinamika kultural yang memengaruhi internalisasi nilai integritas dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penelitian mengintegrasikan analisis hukum, kebijakan publik, dan realitas sosial secara komprehensif.

Secara normatif, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi dan kebijakan terkait pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi, serta penguatan integritas publik, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen strategi nasional, dan laporan tahunan lembaga antikorupsi. Analisis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai anti korupsi telah diformulasikan sebagai bagian dari agenda kebangsaan dan bagaimana prinsip integritas ditempatkan dalam kerangka ideologi Pancasila serta sistem hukum nasional.

Sementara itu, secara empiris penelitian dilakukan melalui studi kasus pada institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas yang menjalankan program pendidikan atau kampanye antikorupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan akademisi, aktivis antikorupsi, pendidik, serta perwakilan lembaga publik.

Selain itu, dilakukan observasi terhadap implementasi program pendidikan antikorupsi dan analisis dokumen seperti modul pembelajaran, materi kampanye, serta laporan kegiatan.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama: (1) konstruksi nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan, (2) strategi internalisasi nilai dalam pendidikan dan ruang publik, serta (3) tantangan struktural dan kultural dalam membangun budaya integritas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan validitas interpretasi.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara nilai anti korupsi dan identitas nasional, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis dalam membangun Indonesia berintegritas secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dapat Diposisikan Sebagai Simbol Kebangsaan Dalam Membangun Identitas Nasional Indonesia Yang Berintegritas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi nilai-nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan harus dimulai dari pengakuan terhadap kondisi empiris korupsi di Indonesia. Data Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 menunjukkan bahwa skor Indonesia berada pada angka 34 dari 100 dan masih berada di bawah rata-rata global (Transparency International, 2023). Kondisi ini menandakan bahwa persepsi terhadap integritas tata kelola publik masih belum kuat. Selain itu, laporan tahunan lembaga antikorupsi nasional mencatat ratusan perkara korupsi yang ditangani dalam kurun waktu 2022–2023, dengan pola dominan berupa suap, penyalahgunaan kewenangan, dan pengadaan barang/jasa (KPK, 2023). Fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar deviasi individu, melainkan persoalan struktural yang menyentuh sistem nilai dan budaya birokrasi.

Dalam perspektif identitas nasional, simbol kebangsaan dibangun melalui nilai kolektif yang diyakini dan dipraktikkan secara konsisten oleh warga negara. Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab publik merupakan nilai yang selaras dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan praktik sosial. Pendidikan antikorupsi telah diintegrasikan dalam kurikulum nasional dan program kampanye publik, tetapi internalisasi nilai belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kebiasaan sosial yang mapan (KPK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi simbol kebangsaan berbasis anti korupsi memerlukan pendekatan yang melampaui penyampaian materi kognitif menuju pembentukan budaya integritas.

Analisis tematik terhadap wawancara dengan akademisi, pendidik, dan aktivis masyarakat sipil menunjukkan bahwa nilai anti korupsi dapat diposisikan sebagai simbol kebangsaan melalui tiga mekanisme utama: institusionalisasi, simbolisasi, dan praksis sosial. Institusionalisasi dilakukan melalui regulasi, kebijakan publik, dan sistem tata kelola yang transparan. Simbolisasi dilakukan melalui narasi kebangsaan, kampanye publik, dan penguatan representasi integritas dalam ruang simbolik negara. Sementara itu, praksis sosial menuntut konsistensi perilaku individu dan kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi institusional, reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas. Implementasi e-government dan sistem pengadaan elektronik di berbagai kementerian dan pemerintah daerah telah mengurangi peluang praktik koruptif secara administratif (UNDP, 2024). Namun, penelitian ini menemukan bahwa kemajuan teknis tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan budaya kerja yang konsisten. Artinya, transformasi sistem belum otomatis melahirkan transformasi nilai.

Pada aspek simbolisasi, penelitian menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi nasional yang melibatkan media dan lembaga pendidikan memiliki dampak pada peningkatan kesadaran

publik, tetapi efektivitas jangka panjang bergantung pada kredibilitas institusi penegak hukum. Survei kepercayaan publik menunjukkan bahwa legitimasi lembaga penegak hukum sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai integritas (OECD, 2022). Ketika publik melihat konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu, maka nilai anti korupsi lebih mudah diterima sebagai bagian dari identitas nasional.

Aspek praksis sosial menjadi dimensi paling krusial dalam konstruksi simbol kebangsaan. Wawancara menunjukkan bahwa keteladanan pemimpin publik berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas sebagai norma kolektif. Tanpa keteladanan, kampanye nilai cenderung dipersepsikan sebagai retorika. Oleh karena itu, nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan harus diwujudkan dalam praktik nyata yang konsisten di berbagai sektor, termasuk birokrasi, pendidikan, dan sektor swasta.

Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan kultural yang memengaruhi konstruksi nilai anti korupsi. Di beberapa konteks sosial, praktik patronase dan nepotisme masih dianggap wajar dalam kerangka solidaritas keluarga atau komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kultural yang kontekstual dalam menanamkan nilai integritas. Nilai anti korupsi harus dikaitkan dengan prinsip moral dan agama yang telah hidup dalam masyarakat agar lebih mudah diterima sebagai norma sosial.

Untuk merangkum hasil analisis, berikut tabel yang menggambarkan konstruksi nilai anti korupsi sebagai simbol kebangsaan beserta indikator implementasinya:

Dimensi Konstruksi	Bentuk Implementasi	Indikator Evaluasi
Institusionalisasi	Reformasi regulasi, e-government, transparansi anggaran	Penurunan kasus korupsi, peningkatan indeks tata kelola
Simbolisasi	Kampanye nasional, pendidikan antikorupsi, narasi kebangsaan	Peningkatan kesadaran publik, survei persepsi integritas
Praksis Sosial	Keteladanan pemimpin, partisipasi publik, budaya kerja bersih	Tingkat kepercayaan publik, partisipasi pengawasan masyarakat

Tabel 1. Tabel: Konstruksi Nilai Anti Korupsi sebagai Simbol Kebangsaan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai anti korupsi dapat diposisikan sebagai simbol kebangsaan apabila diintegrasikan secara sistemik antara kebijakan, pendidikan, komunikasi publik, dan praktik sosial. Simbol kebangsaan berbasis integritas tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses berkelanjutan yang melibatkan konsistensi tindakan dan legitimasi moral. Dengan pendekatan multidimensional tersebut, identitas nasional Indonesia yang berintegritas dapat diperkuat sebagai fondasi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

2. Strategi Internalisasi Dan Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan, Kebijakan Publik, Dan Budaya Masyarakat Guna Memperkuat Integritas Sebagai Identitas Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai anti korupsi sebagai fondasi identitas nasional memerlukan strategi yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan lintas sektor. Integritas tidak dapat dipahami hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai nilai budaya yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, strategi internalisasi harus mencakup transformasi pada tiga arena utama: pendidikan, kebijakan publik, dan budaya sosial. Ketiga arena tersebut saling memperkuat dalam membentuk ekosistem integritas nasional.

1) Strategi Internalisasi dalam Pendidikan

a. Transformasi Kurikulum Menuju Pendidikan Integritas Holistik

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional melalui pendekatan pendidikan karakter. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada metode implementasi. Sekolah yang hanya

memasukkan materi antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran teoritis cenderung menghasilkan pemahaman kognitif semata. Sebaliknya, institusi yang mengintegrasikan nilai integritas dalam praktik sehari-hari seperti sistem transparansi pengelolaan dana sekolah, mekanisme musyawarah kelas, dan budaya kejujuran dalam evaluasi akademik menunjukkan hasil internalisasi yang lebih kuat.

Pendekatan pendidikan integritas harus bersifat holistik, yaitu mencakup dimensi kognitif (pengetahuan tentang korupsi), afektif (kesadaran moral), dan psikomotorik (praktik perilaku jujur). Pendidikan nilai yang tidak diiringi pembiasaan berisiko melahirkan generasi yang memahami korupsi secara normatif tetapi tidak memiliki komitmen praktis untuk menolaknya.

b. Keteladanan dan Budaya Institusi Pendidikan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keteladanan guru dan pimpinan lembaga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter siswa. Ketika peserta didik menyaksikan praktik transparansi dan akuntabilitas di lingkungan sekolah, nilai integritas lebih mudah terinternalisasi. Sebaliknya, inkonsistensi antara ajaran dan praktik menimbulkan relativisme moral.

Oleh karena itu, strategi internalisasi harus mencakup pelatihan integritas bagi pendidik, audit etika institusi, serta sistem penghargaan terhadap praktik jujur. Pendidikan integritas tidak cukup sebagai kurikulum tambahan, tetapi harus menjadi budaya organisasi sekolah dan perguruan tinggi.

c. Literasi Digital dan Pendidikan Anti Korupsi di Era Siber

Era digital membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pengawasan publik. Dengan penetrasi internet nasional yang tinggi, kampanye dan edukasi antikorupsi dapat disebarluaskan secara masif. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, ruang digital juga dapat menjadi arena penyebaran disinformasi yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan integritas perlu diintegrasikan dengan literasi digital, termasuk kemampuan memverifikasi informasi, memahami transparansi data publik, serta menggunakan teknologi untuk pengawasan sosial. Generasi muda yang melek digital berpotensi menjadi agen transformasi integritas nasional.

2) Strategi Implementasi dalam Kebijakan Publik

a. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Transparan

Implementasi nilai anti korupsi dalam kebijakan publik menuntut reformasi struktural yang nyata. Digitalisasi layanan publik, sistem pengadaan elektronik, dan keterbukaan anggaran telah menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan transparansi. Namun, penelitian menemukan bahwa reformasi sistem harus dibarengi dengan transformasi budaya birokrasi.

Integritas aparatur negara tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan, tetapi juga oleh internalisasi nilai etika pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi implementasi harus mencakup pendidikan etika bagi ASN, sistem promosi berbasis meritokrasi, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran integritas.

b. Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik

Budaya integritas nasional hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki ruang partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Mekanisme pelaporan publik, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelapor menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses pengawasan cenderung memiliki tingkat kesadaran integritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, implementasi nilai anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan kolektif warga negara.

- c. **Konsistensi dan Keteladanan Kepemimpinan Publik**
 Simbol kebangsaan berbasis integritas sangat ditentukan oleh teladan pemimpin. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka nilai integritas memperoleh legitimasi moral. Sebaliknya, inkonsistensi penegakan hukum melemahkan kredibilitas simbol integritas nasional.
 Oleh karena itu, strategi implementasi harus menempatkan kepemimpinan etis sebagai prioritas, termasuk transparansi harta kekayaan, akuntabilitas kebijakan, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) **Strategi Transformasi Budaya Masyarakat**
- a. **Rekonstruksi Norma Sosial dan Budaya Patronase**
 Penelitian menemukan bahwa dalam beberapa konteks sosial, praktik patronase dan nepotisme masih dipandang sebagai bentuk loyalitas keluarga atau solidaritas komunitas. Tantangan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti korupsi harus dilakukan melalui pendekatan budaya yang kontekstual.
 Strategi transformasi budaya perlu mengaitkan nilai integritas dengan ajaran agama, nilai kearifan lokal, dan filosofi kebangsaan. Ketika integritas dipahami sebagai bagian dari moralitas kolektif, maka nilai tersebut lebih mudah diterima sebagai norma sosial.
- b. **Kampanye Nasional dan Gerakan Sosial Integritas**
 Kampanye publik yang konsisten dan melibatkan berbagai elemen masyarakat terbukti meningkatkan kesadaran kolektif. Namun, kampanye yang bersifat simbolik tanpa konsistensi kebijakan berisiko kehilangan makna. Oleh karena itu, kampanye harus disertai tindakan nyata dan transparansi institusional.
 Gerakan sosial berbasis komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas di tingkat lokal. Kegiatan diskusi, pelatihan, dan deklarasi komitmen bersama memperkuat solidaritas dalam menolak praktik korupsi.
- c. **Peran Generasi Muda sebagai Agen Budaya Integritas**
 Generasi muda memiliki potensi besar dalam mentransformasikan budaya sosial melalui media digital dan jejaring komunitas. Kampanye kreatif berbasis nilai kebangsaan, konten edukatif, serta gerakan kolaboratif di media sosial menjadi instrumen efektif dalam membangun narasi integritas nasional.
 Penelitian menunjukkan bahwa narasi yang dikemas secara kontekstual dan inspiratif lebih mudah diterima generasi muda dibandingkan pendekatan normatif yang kaku. Oleh karena itu, strategi budaya harus adaptif terhadap karakter generasi digital.

Arena Strategis	Pendekatan Internalisasi	Dampak terhadap Integritas Nasional
Pendidikan	Kurikulum holistik, keteladanan guru, literasi digital	Pembentukan karakter jujur dan tanggung jawab
Kebijakan Publik	Reformasi birokrasi, digitalisasi, partisipasi publik	Peningkatan transparansi dan kepercayaan publik
Budaya Masyarakat	Pendekatan religius-kultural, kampanye sosial, peran generasi muda	Integritas sebagai norma kolektif bangsa

Tabel 2. Ringkasan Strategi Komprehensif

Secara keseluruhan, internalisasi dan implementasi nilai anti korupsi memerlukan pendekatan integratif antara pendidikan, kebijakan publik, dan transformasi budaya. Integritas sebagai identitas nasional tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi formal, tetapi melalui konsistensi praktik, keteladanan kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan strategi multidimensional tersebut, nilai anti korupsi dapat bertransformasi dari sekadar norma hukum menjadi simbol kebangsaan yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai anti korupsi dapat dikonstruksi dan diinternalisasikan sebagai simbol kebangsaan apabila ditempatkan tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai fondasi moral dan budaya dalam kehidupan bernegara. Integritas sebagai identitas nasional menuntut konsistensi antara regulasi, praktik kelembagaan, dan perilaku sosial. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan berperan strategis dalam membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan praksis. Sementara itu, reformasi kebijakan publik melalui digitalisasi tata kelola, penguatan partisipasi masyarakat, dan konsistensi penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi integritas negara.

Lebih jauh, transformasi budaya masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat integritas sebagai norma kolektif. Keteladanan kepemimpinan, rekonstruksi nilai sosial yang menolak patronase dan nepotisme, serta partisipasi generasi muda dalam ruang digital memperluas jangkauan internalisasi nilai anti korupsi. Dengan pendekatan multidimensional yang terintegrasi antara pendidikan, kebijakan, dan budaya, integritas dapat bertransformasi dari sekadar slogan normatif menjadi jati diri bangsa. Oleh karena itu, membangun Indonesia berintegritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen kolektif seluruh elemen negara dan masyarakat guna mewujudkan identitas nasional yang bermartabat dan berkelanjutan.

Referensi

- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. Transparency International.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan KPK 2022*. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Strategi pendidikan antikorupsi nasional*. KPK RI.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Public integrity handbook*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing.
- United Nations Development Programme. (2024). *Anti-corruption and integrity in public administration*. UNDP.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global report on corruption and governance*. UNODC.
- World Bank. (2023). *Enhancing government effectiveness and transparency*. World Bank Publications.
- World Bank. (2022). *Governance indicators update*. World Bank Publications.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Penguatan pendidikan karakter dan integritas nasional*. Kemendikbudristek RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan literasi digital Indonesia 2023*. Kominfo RI.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2024*. APJII.
- Prasetyo, T., & Huda, N. (2022). Pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 115–130.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Integritas publik dan reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–60.
- Wibowo, A. (2020). Internalisasi nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 8(3), 210–225.
- Rahman, F., & Putri, D. (2023). Digital governance dan transparansi anggaran daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 77–92.
- Hidayat, R. (2022). Budaya patronase dan tantangan pemberantasan korupsi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 189–204.
- Anwar, M. (2021). Integritas sebagai identitas nasional dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 301–318.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk pembudayaan*. Mizan.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi terbaru). Gramedia.
- Hadiz, V. R. (2020). *Political corruption and oligarchy in Indonesia*. Routledge.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Setiawan, B. (2022). Meritokrasi dan integritas aparatur sipil negara. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 90–105.
- Utami, S. (2023). Literasi digital dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 55–70.
- Kurniawan, T. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 145–160.
- Maulana, I. (2024). Pendidikan karakter berbasis nilai integritas di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 15(1), 1–14.
- Santoso, P. (2022). Kepemimpinan etis dan budaya organisasi publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(3), 233–248.
- Nurhadi, D. (2023). Kampanye antikorupsi dan perubahan perilaku sosial. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 19(2), 211–226.
- Halim, A. (2020). Reformasi birokrasi dan penguatan good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(4), 367–382.

- International IDEA. (2022). *Global state of democracy report 2022*. International IDEA.
- Asian Development Bank. (2021). *Strengthening governance and anti-corruption efforts in Asia*. ADB.
- United Nations. (2023). *Sustainable development goals report 2023*. United Nations.
- Mietzner, M. (2021). Authoritarian innovations and democratic decline in Indonesia. *Journal of Democracy*, 32(4), 19–33.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. (2021). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Johnston, M. (2020). *Corruption, contention, and reform*. Cambridge University Press.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2021). *Political corruption: Concepts and contexts*. Routledge.
- Pope, J. (2020). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Transparency International.
- UNESCO. (2021). *Education for sustainable development and global citizenship*. UNESCO Publishing.